

Judul : Haryono Umar, Bekas Wakil Ketua KPK: Kalau Ingin Memperkuat KPK, Kelemahannya Diperbaiki & Kebutuhannya Anggarannya Dicurangi

Tanggal : Senin, 17 Juli 2017

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 2

HARYONO UMAR, Bekas Wakil Ketua KPK Kalau Ingin Memperkuat KPK, Kelemahannya Diperbaiki & Kebutuhannya Anggarannya Dicurangi



POLEMIK Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Aksi penolakan terhadap Panitia Khusus (Pansus) hak angket terus terjadi. Terbaru, perwakilan pegawai KPK mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), guna mempertanyakan penggunaan hak angket kepada komisi anti rasuah tersebut.

Kendati banyak mendapat penolakan, Pansus Hak Angket KPK terus berjalan. Beberapa waktu lalu, Pansus mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung, guna meminta masukan terkait laporan keuangan, dan kerja sama dengan KPK. Tak hanya itu Pansus juga menghadirkan sejumlah pakar hukum tata negara, guna meminta pandangan hukumnya. Berikut pendapat bekas Wakil Ketua KPK, Haryono Umar terkait polemik tersebut.

Bagaimana pandangan Anda terkait polemik hak

angket ini?

Pak Yusril cs bilang angket itu bisa dikenakan ke KPK. Sementara ahli tata negara menyatakan KPK bukan objek dari hak angket. Jadi karena ada perdebatan seperti itu, semua dengan logikannya masing-masing, daripada berketerusan KPK akhirnya minta judicial review kepada MK. Sekarang kan itu sedang diproses di MK, kita tunggu sajalah, apa pun hasilnya dari MK ya semua pihak harus mengikuti, biar ada kepastian hukum.

Tapi menurut Anda DPR punya niat buruk enggak dengan hak angket ini?

Begini, mereka kan mengatakan ingin memperkuat. Sementara pihak lain menilai ingin memperlemah. Tapi menurut saya, kalau ingin memperkuat mereka tuh harus lihat dua sisi. Sisi yang pertama, kalau umpamanya KPK ada kelemahan, kan mereka mengatakan KPK

ada kelemahan ini itu segala macam, itu harus diklarifikasi, untuk kemudian diperbaiki agar kelemahan itu enggak terjadi lagi di kemudian hari. Itu kalau memang terbukti ada kelemahan. Lalu yang kedua, hal-hal yang selama ini sudah jadi keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi itu harus diperkuat. Kalau bisa lebih agresif lagi upaya-upaya memperkuat keberhasilannya itu. Misalnya dengan cara membandingkan pencapaiannya dengan kebutuhan anggarannya. Kalau begitu kan jelas terlihat mau memperkuat, bukan seperti yang diungkapkan selama ini. Menurut saya ini karena komunikasi politiknya yang tidak bagus dengan teman-teman DPR ini.

Hak angket ini kan muncul seiring adanya kemajuan penyidikan kasus KTP elektronik, di mana banyak anggota DPR diduga terlibat. Menurut Anda ada sangkut

pautnya enggak sih?

Angket itu kan politik ya, sementara masalah e-KTP kan hukum. Jadi sebetulnya itu suatu yang berbeda. Hukum enggak bisa diintervensi politik. Jadi menurut saya kita jalan saja terus, dengan penanganan kasusnya. Dalam berbagai kesempatan DPR juga menyatakan supaya jalan saja terus pemeriksaannya. Jadi semuanya jalan saja secara paralel. Kalau nanti MK menyatakan hak angket enggak menyalahi, ya jalan saja. Kalau MK menyatakan lain ya harus dipatuhi juga.

Sebagai bekas komisioner KPK, menurut Anda apa sih yang harus diperkuat dari KPK?

Menurut saya selama ini banyak yang sudah dicapai oleh KPK. KPK ini satu-satunya lembaga yang konsisten, setiap kasus yang dibawa ke pengadilan 100 persen terbukti bersalah. Belum lagi menyelamatkan keuangan

negara, itu sekitar Rp 200 triliun. Belum lagi dampaknya sebagai outcome. Orang jadi lebih berhati-hati, terutama di jajaran PNS. Pelayanan publik kita jadi lebih baik, indikator pemberantasan korupsi kita pun sudah jadi lebih baik. Memang ada juga persoalan seperti dinyatakan pansus, itu harus diklarifikasi, enggak boleh dibiarkan saja. Itu akan mengganggu legitimasi. Tinggal forumnya apa diserahkan nanti MK. Apakah forumnya angket atau yang lain, yang penting itu harus diselesaikan hingga tuntas. Sebagai penegak hukum KPK harus bebas dari masalah semacam itu. Menurut saya sisi-sisi memperkuatnya di situ. Yang selama ini dianggap keberhasilan harus dipercepat, sehingga Indonesia bebas dari korupsi. Kemudian juga yang masih dianggap bermasalah harus diklarifikasi. Hal itu kan sudah sampai ke publik. Kalau memang betul-betul ada masalah harus diperbaiki. ■ **NNM/MDA**